

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Beberapa kasus yang menjadi sorotan saat ini mengenai perusahaan yang bergerak di *basic materials*, dimana dalam menjalankan aktivitas perusahaannya tidak memenuhi prinsip ESG. Salah satu contoh kasus terkait pilar *environmental* yaitu operasi tambang PT Aneka Tambang (Antam) yang mencemari sungai dan pesisir pantai sehingga merusak ekosistem *mangrove* dan laut. Para peneliti juga menemukan *biological oxygen demand* dan *chemical oxygen demand* indikator pencemaran laut di Laut Buli sebesar 23-37 miligram per liter dan 27-75 miligram per liter. Yang mana angka ini jauh di ambang batas laut normal (Della Syahni, 2021). Adapun aktivitas dari PT Semen Indonedia mengenai dampak lingkungan yang dirasakan warga yaitu polusi udara, getaran dan kebisingan, selain dampak pencemaran udara dan debu, getaran dari aktivitas ledakan tambang batu kapur yang mengakibatkan sejumlah rumah warga retak (Huda Khoirul, 2019). Dan aktivitas PT. Vale yang mencemari lingkungan di pesisir Pulau Mori, Desa Harapan dengan ditemukannya limbah sulfur milik PT Vale yang berserakan mencemari pulau Mori (Gatro Sandra, 2022). Selanjutnya, terdapat kasus pilar *social* yaitu operasi PT. Trimegah Bangun Persada, serta seluruh perusahaan Harita Group di Kawasi yang tidak mematuhi prinsip-prinsip ESG. Yang mengambil pemukiman penduduk setempat juga lahan perkebunan, mencemari sumber air, mencemari udara dari debu dan polusi yang mempengaruhi kesehatan penduduk setempat, hingga berujung pada konflik sosial akibat kekerasan terhadap penduduk setempat yang berusaha untuk mempertahankan tempat tinggalnya (Jaringan Advokasi Tambang, 2023). Kemudian, adanya kasus pada pilar *governance* yaitu pada PT Waskita Beton Precast Tbk di tahun 2016-2020, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pengadaan fiktif pada pekerjaan subkontraktor dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Amila Nadia, 2022).

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ESG juga mendukung rendahnya perhatian perusahaan terhadap masalah ini. Beberapa kasus yang dilakukan oleh

perusahaan tersebut tentu saja melanggar regulasi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan rencana untuk menerapkan konsep-konsep ESG ke dalam praktik. melalui OJK dimana pemerintah mengeluarkan (POJK No.51, 2017) guna mendorong pengungkapan keberlanjutan. Pelanggaran tersebut membuat masyarakat dan pemangku kepentingan kehilangan kepercayaan terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, menuntut keterbukaan informasi dari perusahaan agar lebih transparan, terutama dalam hal kinerja keberlanjutan. Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan, salah satunya adalah bahwa perusahaan dengan manajemen yang baik dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang dapat diwujudkan melalui pengungkapan ESG.

Tata kelola perusahaan sangat mempengaruhi dalam menentukan seberapa luas pengungkapan ESG (Lagasio & Cucari, 2019). Melalui hal tersebut, operasi perusahaan dapat dilihat oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam kaitannya dengan pengungkapan ESG. (Cui et al., 2018). Tata kelola perusahaan mengacu pada kerangka hukum yang mengatur kegiatan asosiasi manusia dan badan hukum, serta tugas-tugas terkait yang terlibat dalam membentuk perusahaan dan mengelola operasinya. (Lagasio & Cucari, 2019). Berbagai masalah menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban lingkungan, sosial, dan tata kelola demi kinerja keuangan. Penyimpangan etika bisnis yang diidentifikasi oleh perusahaan sebagai pihak internal perusahaan tidak mengikuti standar tata kelola yang baik. (Ghazali et al., 2020).

Manajemen perusahaan perlu mengetahui prosedur tata kelola. Komite audit dan dewan direksi adalah dua contoh sistem tata kelola yang telah menjadi subjek temuan yang tidak konsisten pada sebelumnya (Jimantoro et al., 2023). Komite audit memiliki kemampuan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas dalam hal keberlanjutan menumbuhkan kepercayaan dan berdampak positif pada masyarakat, investor, dan konsumen (esgindonesia, 2023). Menurut Pwc (2023) komite audit berperan mengawasi pengungkapan ESG perusahaan dan memajukan standar keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. Dewan direksi juga dapat meningkatkan

pengungkapan ESG dan mengelola operasi perusahaan lebih baik, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Secara khusus, telah terbukti bahwa menghadiri rapat komite dan Pengungkapan ESG dapat ditingkatkan oleh anggota komite audit internal yang independen dan berpengetahuan luas (Zaman et al., 2021).

Dalam hal ini karakteristik komite audit diproksikan menggunakan independensi komite audit dan jumlah rapat komite audit, sedangkan Jumlah rapat dan ukuran dewan direksi berfungsi sebagai proksi untuk karakteristik dewan. Menurut, Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) merumuskan pedoman umum tata kelola perusahaan indonesia yang baik, yang mencakup lima elemen yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. Pasar yang efektif, transparan, dan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan hanya dapat diciptakan dengan dukungan tata kelola perusahaan (CG). Adapun variabel jumlah rapat komite audit dan dewan direksi ini merupakan hal yang dapat di tempuh dari prinsip gcg yaitu transparansi yang mengacu pada keterbukaan informasi yang relevan terkait dengan kebijakan, keputusan, dan kinerja perusahaan dengan melakukan pertemuan untuk menjaga komunikasi manajemen dan pemegang saham. Dan independensi komite audit merupakan hal yang dapat ditempuh dari prinsip gcg yaitu independensi yang memiliki arti bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam mengelola perusahaan para pemegang saham harus terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain. Hal ini akan melibatkan pemisahan kepentingan antara manajemen dan pengawas, serta penunjukan dewan direksi yang terdiri dari anggota independen yang dapat membuat keputusan netral. Sedangkan, ukuran dewan direksi merupakan hal yang dapat ditempuh dari prinsip gcg yaitu akuntabilitas dan tanggung jawab yang mengacu pada kewajiban dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, terutama dewan direksi dan manajemen, atas tindakan perusahaan. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil serta hasil yang dicapai.

Karakteristik pertama pada komite audit yaitu independensi komite audit. Keefektifan komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dapat berpengaruh dengan adanya independen komite audit,

diperkirakan bahwa pengawasan pihak ketiga yang independen dapat mengurangi kemungkinan kecurangan manajerial. (Josua & Septiani, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Buallay & AlDhaen (2018), Li et al. (2012) menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara komite audit independen dengan pengungkapan ESG. Pozzoli et al. (2022) Struktur tata kelola dipengaruhi oleh komite audit independen, yang juga dapat meningkatkan nilai bisnis dan meningkatkan volume dan kualitas pelaporan pengungkapan ESG. Haniffa & Cooke (2005); Mallin et al. (2013) menunjukkan bahwa kehadiran komite audit independen memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan, Jimantoro et al. (2023), Ofoegbu et al. (2018) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh hubungan antara komite audit independen dengan pengungkapan ESG.

Karakteristik komite audit selanjutnya yaitu jumlah rapat komite audit. Agar pengawasan berfungsi dengan baik, komite audit harus mengadakan pertemuan yang efektif untuk membahas masalah yang dihadapi perusahaan. (Josua & Septiani, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hadrami et al. (2020) jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pengungkapan ESG. Penelitian Buallay & AlDhaen (2018) menunjukkan hubungan yang signifikan antara frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan, penelitian Biçer & Feneir (2019); Jimantoro et al. (2023) menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Karakteristik dewan pertama yaitu ukuran dewan direksi. Penelitian (Lagasio & Cucari, 2019) menegaskan bahwa tingkat pengungkapan ESG meningkat seiring dengan ukuran dewan direksi. Peningkatan pengungkapan dan pengawasan ESG dapat terjadi karena ukuran dewan direksi yang lebih besar. (Husted & Sousa-Filho, 2019). (Birindelli et al., 2018; Ismail et al., 2019; Jimantoro et al., 2023) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Menurut penelitian Husna Gempita (2023) dan Nicholas (2024) ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Di sisi lain, penelitian Ellili (2023) dan Merendino & Melville (2019) menyatakan bahwa memiliki dewan dengan terlalu banyak anggota justru menurunkan kualitas pilihan yang dibuat, sehingga

menyebabkan penundaan dan kesalahpahaman dalam pengungkapan ESG. (Ellili, 2023)

Karakteristik dewan direksi selanjutnya yaitu jumlah rapat dewan direksi. Untuk mengurangi kemungkinan masalah asimetri informasi dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah rapat. Selain itu, tugas dewan yang lebih efektif akan lebih memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Khairiddine et al., 2020). Penelitian Sofa & Respati (2020) mengatakan semakin sering dewan direksi mengadakan rapat, maka tingkat efektivitas komunikasi dan keterbukaan informasi akan meningkat serta dapat memberikan pengawasan operasional yang lebih baik. Menurut, penelitian Husna Gempita et al (2023) dan Sofa & Respati (2020) jumlah rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Sebaliknya (Birindelli et al., 2018; Karamanou & Vafeas, 2005; Lagasio & Cucari, 2019) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan ESG.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Arif et al., 2020) dengan menambahkan variabel atribut dewan direksi sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak atribut komite audit dan dewan direksi terhadap pengungkapan ESG dengan menggunakan data perusahaan dari industri bahan dasar yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Peneliti ingin mengetahui seberapa banyak pengungkapan terkait ESG yang dilaporkan dalam bentuk *sustainability report* yang diterbitkan oleh perusahaan.

Dengan adanya fenomena yang masih banyak permasalahan terhadap pengungkapan laporan ESG dimana perusahaan yang tidak ramah lingkungan dan memiliki sistem manajemen yang tidak transparan, melanggar hukum, dan etika yang tentunya akan menjadi nilai negatif dalam praktik bisnis dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi mengenai beberapa variabel independen yang mempengaruhi pengungkapan ESG. Sehingga, peneliti tertarik untuk memperkuat kembali variabel yang terdapat pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti memilih judul untuk penelitian ini yaitu “ **Pengaruh Atribut Komite Audit dan Atribut Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022** ”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ESG?
2. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ESG?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan ESG?
4. Apakah jumlah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan ESG?

## **1.3 RUANG LINGKUP DAN BATASAN MASALAH**

Pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2020-2022.
3. Penelitian ini dibatasi pada variabel – variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan ESG yaitu komite audit independen, jumlah rapat komite audit, ukuran dewan direksi, dan jumlah rapat dewan direksi.

## **1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap pengungkapan ESG.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan ESG.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan ESG.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan ESG.

## **1.4.2 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat di bidang akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model laporan pengungkapan ESG. Penelitian ini dapat mengurangi kekurangan yang ada dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai laporan pengungkapan ESG.

### **2. Manfaat di bidang non akademik**

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dasar dan pembelajaran bagi pembaca untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Sehingga dapat menjadi masukan bagi para pemakai laporan keuangan baik dalam hal membuat keputusan investasi atau menentukan kebijakan perusahaan untuk memiliki program keberlanjutan